

PERANAN PPAT DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN BPHTB BERKAITAN DENGAN AKTA YANG DIBUATNYA DI KOTA BANDAR LAMPUNG

INTISARI

Ridzki Ardhiati Syihab¹, Sudjito²

Penelitian ini membahas tentang peranan PPAT dalam pelaksanaan pembayaran BPHTB berkaitan dengan akta yang dibuatnya di Kota Bandar Lampung, bertujuan Untuk mengetahui Bagaimanakah Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pelaksanaan Pembayaran BPHTB Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Di Kota Bandar Lampung, dan juga untuk mengetahui Faktor-faktor Penghambat Apa Saja Yang Dihadapi Oleh PPAT Dalam Pelaksanaan Pembayaran BPHTB Di Kota Bandar Lampung terkait dengan adanya perubahan peraturan mengenai Pajak BPHTB.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Disebut penelitian empiris karena penelitian berfokus pada perilaku masyarakat hukum dan dalam penelitian ini membutuhkan data-data primer dan data sekunder sebagai data tambahan. Sementara penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis karena meninjau dan membahas objek penyelidikan dengan menitik beratkan pada aspek-aspek yuridis dan didukung dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

Peranan PPAT dalam pelaksanaan pembayaran pajak BPHTB di Kota Bandar Lampung hanyalah sebagai pihak yang melaksanakan peraturan terkait pembayaran BPHTB sebagai salah satu syarat dalam pembuatan akta yang dibuat oleh PPAT. Kendala-kendala yang dihadapi PPAT dalam pelaksanaan pembayaran BPHTB di Kota Bandar Lampung terkait dengan adanya peralihan kewenangan ke DPPKA ialah kurangnya pengetahuan masyarakat Kota Bandar Lampung, lambatnya proses validasi, dan adanya kekosongan peraturan yang terjadi. Adanya kendala lain bagi pihak DPPKA ialah terkait masalah SDM, sarana dan prasarana yang kurang memadai, stuktur organisasi, dan anggaran menjadi kendala terpenting dalam penyempurnaan pemungutan BPHTB di Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci : Peranan PPAT, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan

¹ Tegak Lempuyangan DN III/97, Yogyakarta

² Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

PPAT ROLE IN CONNECTION WITH THE IMPLEMENTATION OF PAYMENT BPHTB ACTS MADE IN BANDAR LAMPUNG TOWN

ABSTRACT

Ridzki Ardhiati Syihab³, Sudjito⁴

This study reviews the role of PPAT in the implementation of BPHTB payment made relating to deed in Bandar Lampung town, aims to find out how the role of official notarial maker make in Bandar Lampung town and also to identify the factors inhibiting faced by PPAT in the implementation BPHTB payment in Bandar Lampung associated with the change in regulations concerning BPHTB.

This study is an empirical law by using sociological juridical approach. Called empirical research because the research focuses on the behavior of the legal community and the needs of primary data as secondary data additional. While the research conducted by the sociological approach to judicial review and discuss the object because the investigation with emphasis on the juridical aspects and supported by the facts that exist in the field.

PPAT role in the implementation of BPHTB payment in the Bandar Lampung town merely become spearhead the implementation of BPHTB payment. Constraints that faced by PPAT in the implementation of BPHTB payment in Bandar Lampung town associated with the transitional authority of DPPPKA is lack of public knowledge. The slow process of validation and regulatory gaps that occur. The existence of other constrains faced by DPPKA human resources, facilities and infrastructure inadequate organizational structure and budget those are become the most important constrain in improving the collection BPHTB in Bandar Lampung town.

Key words: Role of PPAT, Customs on Acquisition Land Rights and/or Building.

³ Tegallampungan DN III/97, Yogyakarta

⁴ Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta